

MAKALAH

Kasus 5 Polisi di Jateng Kena OTT Kasus Seleksi Penerimaan Bintara Polri Tahun 2022



DI SUSUN OLEH :

Aldiansah Pratama	2216041144
Fahrul Rozie Kamil	2216041134
Aqmal Seta Nugraha	2216041135
Liana Ayu Pratiwi	2216041141
Widiya Luvita Sari	2216041139
Aura Sukma Aulia	2216041147
Safira Nazarani	2216041150
Zalfa Anjaswari	2216041159
Tri Putri Ayu Ningsih	2216041137
Anisa Zulfa Nabila	2216041145
Christine Putri Meylisa	2216041128

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2022

Kata Pengantar

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang selalu mengiringi setiap langkah kita. Tak lupa pula, shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh hidup yang baik dan penuh dengan keberkahan bagi umatnya.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan makalah dengan judul " Kasus Lima Polisi di Jateng Kena OTT Kasus Seleksi Penerimaan Bintara Polri Tahun 2022". Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas diskusi dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara, dengan tujuan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada kasus seleksi penerimaan bintara polri.

Dalam makalah ini, kelompok kami akan membahas tentang pendahuluan masalah, latar belakang masalah, analisis kasus, dampak kasus, solusi, dan kesimpulan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca.

Kelompok kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan makalah ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan anggota yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.

Wassalamualaikum wr. wb.

Bandar Lampung, 08 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
BAB 2. PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian	3
2.2 Analisis kasus	3
2.3 Dampak kasus	5
2.4 Solusi	5
BAB 3. PENUTUP	6
3.1 Kesimpulan	6
3.2 Saran	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan anggota Polri melalui seleksi ketat yang terdiri dari berbagai tahapan tes dan wawancara. Tujuan dari seleksi ketat tersebut adalah untuk memastikan bahwa hanya kandidat terbaik yang bergabung dengan Polri. Namun, kasus-kasus penyelewengan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu kasus terbaru terjadi di Jawa Tengah, di mana lima polisi ditangkap oleh tim Satgas Saber Pungli karena terlibat dalam kasus penerimaan suap dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2022.

Kasus ini bermula dari informasi dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2022 di wilayah Jawa Tengah. Tim Satgas Saber Pungli melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa ada lima polisi yang terlibat dalam penerimaan suap untuk memasukkan kandidat tertentu ke dalam daftar penerimaan Bintara Polri. Kelima polisi tersebut langsung ditangkap oleh tim Satgas Saber Pungli.

Masalah ini memicu reaksi negatif dari masyarakat karena selain merugikan calon pelamar yang jujur dan memiliki kualifikasi baik, juga mengakibatkan turunnya kualitas anggota Polri yang direkrut. Penerimaan calon bintara Polri yang tidak transparan dan adil juga dapat mengancam kredibilitas dan integritas Polri sebagai institusi penegak hukum yang diharapkan menjadi pilar keamanan dan ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pihak-pihak terkait, seperti Polri, Kementerian PANRB, dan masyarakat untuk mengatasi praktik suap dalam penerimaan calon bintara Polri. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik suap, peningkatan pengawasan dan transparansi dalam proses penerimaan calon bintara Polri, serta peningkatan kualitas dan kredibilitas Polri menjadi langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya praktik suap dalam penerimaan calon bintang Polri?
2. Bagaimana analisis kasus dari praktik suap dalam penerimaan calon bintang polri?
3. Apa yang menjadi hambatan dalam upaya untuk mengatasi praktik suap dalam penerimaan calon bintang Polri?
4. Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik suap dalam penerimaan calon bintang Polri di masa depan?

1.3 Tujuan Masalah

1. Mengidentifikasi penyebab terjadinya praktik suap dalam penerimaan calon bintang polri
2. Mengevaluasi dampak praktik suap terhadap kredibilitas dan integrasi polri.
3. Mengevaluasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik suap dalam penerimaan calon bintang polri dimasa depan.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian

Suap adalah tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang memegang kekuasaan atau jabatan, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambil oleh orang tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Suap biasanya diberikan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan yang tidak sah.

Dalam konteks hukum, suap termasuk ke dalam tindak pidana korupsi dan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Selain itu, suap juga dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga atau pejabat yang menerima suap. Oleh karena itu, pemberian suap harus dihindari dan dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum.

Suap memiliki dampak yang sangat buruk bagi pemerintahan, masyarakat, dan ekonomi suatu negara. Tindakan suap dapat merusak prinsip keadilan dan demokrasi, serta merugikan masyarakat yang seharusnya menerima pelayanan publik dengan baik. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pencegahan suap harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan masyarakat.

Dalam penanganan kasus suap, dibutuhkan kerja sama antara pihak yang berwenang, masyarakat, dan media massa untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan tindakan pencegahan suap. Selain itu, perlu juga dilakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya suap dan dampak negatifnya, serta pentingnya integritas dan keterbukaan dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

2.2 Analisis kasus

Penyuapan Polri adalah tindakan yang melibatkan memberikan uang atau barang berharga lainnya kepada Polri sebagai bentuk upaya untuk menghindari konsekuensi hukum atau mendapatkan perlakuan yang menguntungkan. Ini adalah praktik yang ilegal dan merugikan integritas lembaga kepolisian serta mengancam keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Kasus ini menunjukkan adanya praktik korupsi dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri. Kelima polisi tersebut meminta uang kepada kandidat agar dapat memasukkan nama mereka ke dalam daftar penerimaan Bintara Polri. Praktik korupsi ini sangat merugikan bagi Polri dan masyarakat, karena akan mempengaruhi kualitas dan profesionalisme anggota Polri di masa depan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan praktik suap dalam penerimaan calon bintang Polri, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah formasi: Jumlah formasi yang terbatas dapat menyebabkan persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan satu posisi. Hal ini bisa memicu praktik suap, di mana calon bintang yang memiliki modal lebih dapat membeli posisi tersebut dengan memberikan suap kepada pihak yang terlibat dalam seleksi.
2. Korupsi dalam sistem seleksi: Adanya korupsi dalam sistem seleksi juga dapat memicu praktik suap. Misalnya, anggota Polri atau petugas penerima suap dapat memanipulasi nilai atau hasil tes agar calon tertentu lebih mudah lolos seleksi.
3. Kebutuhan finansial: Beberapa calon bintang mungkin membutuhkan uang untuk membiayai pendidikan atau kebutuhan keluarga mereka. Kebutuhan finansial ini bisa memicu calon untuk mencari uang dengan cara yang tidak sah, termasuk dengan memberikan suap kepada pihak yang terlibat dalam seleksi.
4. Persepsi keadilan yang rendah: Banyak orang yang merasa bahwa sistem seleksi calon bintang Polri tidak adil, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti koneksi atau suap. Hal ini dapat membuat beberapa orang merasa bahwa praktik suap adalah satu-satunya cara untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan pesaing mereka.

Adapun beberapa hambatan dalam upaya penerimaan calon bintang polri :

1. Kurangnya sumber daya dan anggaran: Upaya memberantas praktik suap dalam penerimaan calon bintang Polri membutuhkan sumber daya dan anggaran yang cukup besar, seperti peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan kualitas seleksi. Kurangnya sumber daya dan anggaran dapat menjadi hambatan dalam upaya tersebut.
2. Lemahnya integritas dan profesionalisme dalam lembaga Polri: Suap dapat menjadi budaya yang terkait dengan lembaga Polri, di mana para petugas menerima suap atau memfasilitasi praktik suap dalam penerimaan calon bintang Polri. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam lembaga Polri agar tidak terjadi praktik suap dalam penerimaan calon bintang.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat: Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari praktik suap dapat menjadi hambatan dalam upaya mengatasi praktik

suap dalam penerimaan calon bintang Polri. Masyarakat harus diberikan pemahaman dan edukasi tentang pentingnya menjunjung tinggi integritas dan moralitas serta bahaya yang ditimbulkan dari praktik suap.

4. Sulitnya memerangi praktik suap yang tersembunyi: Praktik suap dalam penerimaan calon bintang Polri seringkali terjadi secara tersembunyi dan sulit dideteksi. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam upaya memberantas praktik suap tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan metode pengawasan yang kuat untuk mendeteksi praktik suap yang tersembunyi.

2.3 Dampak kasus

Secara umum, penyuapan Polri menghasilkan beberapa dampak negatif. Pertama, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga kepolisian dan membuat orang tidak mau melapor atau bekerjasama dengan Polri dalam menangani masalah keamanan dan kriminalitas. Kedua, penyuapan Polri dapat memperburuk situasi kriminal karena memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melanggar hukum tanpa harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ketiga, kasus ini dapat merusak citra Polri sebagai institusi yang bertugas untuk melindungi dan melayani masyarakat. Terakhir, penyuapan Polri juga dapat menciptakan ketidakadilan dan memperparah masalah sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat.

2.4 Solusi

Untuk mengatasi praktik korupsi dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri, Polri harus melakukan tindakan tegas dan transparan terhadap pelaku korupsi. Polri juga harus meningkatkan pengawasan dan pemantauan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri untuk mencegah praktik korupsi yang serupa terjadi di masa depan. Polri juga harus meningkatkan standar etika dan integritas dalam rekrutmen anggota mereka. Selain itu, perlu juga membangun budaya yang menghargai kejujuran dan integritas dalam lembaga kepolisian serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menegakkan hukum

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kasus lima polisi di Jawa Tengah yang terlibat dalam praktik korupsi dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2022 menunjukkan bahwa praktik korupsi masih terjadi dalam penerimaan anggota Polri. Hal ini sangat merugikan bagi Polri dan masyarakat. Oleh karena itu, Polri harus melakukan tindakan tegas dan transparan terhadap pelaku korupsi serta meningkatkan pengawasan dan memberikan pendidikan serta pelatihan kepada anggota polisi tentang etika, integritas sehingga dapat mencegah tindakan suap dan memperkuat integritas institusi tersebut.

3.2 Saran

Sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi harus menjunjung tinggi integritas dan moralitas dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai gantinya, jika seorang polisi diberi tawaran suap, sebaiknya polisi tersebut menolak tawaran tersebut dan memberitahu kepada atasannya atau pihak yang berwenang. Dengan melakukan tindakan ini, polisi dapat membantu untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi serta menjaga integritas dan moralitas dari lembaga kepolisian itu sendiri.

Polisi juga dapat memperkuat integritas dan moralitas dalam menjalankan tugasnya dengan meningkatkan pemahaman akan kode etik kepolisian dan mengikuti pelatihan yang memperkuat integritas dan moralitas. Selain itu, polisi juga dapat memberikan pelaporan yang transparan dan akuntabel terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau tindakan yang tidak sesuai dengan etika dan moralitas. Dalam jangka panjang, perlu adanya reformasi dan perubahan struktural dalam sistem kepolisian guna memperkuat integritas dan moralitas dari lembaga kepolisian itu sendiri serta memperbaiki sistem keamanan dan penegakan hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Muchamad Dafi Yusuf Editor. (2023, March 3). *Lima Polisi di Jateng Kena OTT Kasus Seleksi Penerimaan Bintara Polri Tahun 2022*.

<https://regional.kompas.com/read/2023/03/03/132004478/lima-polisi-di-jateng-kena-ott-kasus-seleksi-penerimaan-bintara-polri-tahun>

Rachmawati. (2023, September 3). 5 Fakta Kasus Calo Bintara Polri 2022 di Jateng, 5 Polisi Terlibat, Ada yang Setor Rp 2,5 Miliar.

<https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/03/09/174000678/5-Fakta-Kasus-Calo-Bintara-Polri-2022-Di-Jateng-5-Polisi-Terlibat-Ada-Yang?Page=all>.